



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI BARAT  
NOMOR: W.33-60.HN.04.03 TAHUN 2023

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK  
ASASI MANUSIA SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA KANTOR WILAYAH,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjamin terciptanya Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang Terpadu dan Terintegrasi di Instansi Pemerintah dan Institusi lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
- b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Promosi, Kerjasama, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;

5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Nomor: SP.DIPA-013.10.2.667799/2023 tanggal 30 November 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Nomor: SP.DIPA-013.10.2.667799/2023 tanggal 30 November 2022;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Mamuju  
Pada tanggal : 2 Februari 2023  
KEPALA KANTOR WILAYAH,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

PARLINDUNGAN  
NIP 197007011992031002

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
3. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Mamuju;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat  
Nomor : W.33-60.HN.04.03 Tahun 2023  
Tanggal : 2 Februari 2023

**TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
SULAWESI BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**A. TIM PEMBINA**

Ketua : Kepala Kantor Wilayah  
Anggota : 1. Kepala Divisi Administrasi  
2. Kepala Divisi Imigrasi  
3. Kepala Divisi Pemasarakatan

**B. TIM TEKNIS**

Ketua : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM  
Sekretaris : Kepala Bidang Hukum  
Anggota : 1. Kepala Bagian Umum  
2. Kepala Bagian Program dan Humas  
3. Kepala Sub Bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, JDIH  
4. Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat, RB, dan TI  
5. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, TU dan Rumah Tangga  
6. Ramli R  
7. Achmad Fauzie Azis  
8. Ahmadi  
9. Reynelda Simamora  
10. Muhammad Aldi Wiratama  
11. Muafiq



KEPALA KANTOR WILAYAH,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**PARLINDUNGAN**

NIP 197007011992031002